

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Keterbatasan ruang dan waktu dalam proses sosialisasi kebijakan sehingga isi kebijakan tidak tersampaikan kepada seluruh sasaran kebijakan yakni pengusaha perdagangan. Berdasarkan analisis besarnya pengaruh antara komunikasi terhadap keberhasilan implementasi sebesar 96,2 persen, dengan nilai signifikansi 0,000. Dengan demikian terbukti kebenarannya bahwa komunikasi berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi.
2. Ketersediaan staff atau petugas lapangan untuk mendukung berjalannya kebijakan masih kurang, hal ini dapat menghambat proses pelaksanaan kebijakan untuk mensukseskan implementasi upah minimum regional pada sektor perdagangan di Purwokerto Kabupaten Banyumas. Berdasarkan analisis besarnya pengaruh sumber daya terhadap keberhasilan implementasi sebesar 95,5 persen, dengan nilai signifikansi 0,000. Dalam hal ini terbukti kebenarannya bahwa sumber daya berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi.
3. Kurang tegasnya aparat pelaksana kepada perusahaan perdagangan yang belum mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini akan menghambat keberhasilan implementasi. Berdasarkan analisis besarnya pengaruh antara disposisi terhadap keberhasilan implementasi sebesar

90,7% persen, dengan nilai signifikansi 0,000. Dengan demikian terbukti kebenarannya bahwa disposisi berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi.

4. Struktur birokrasi dalam implementasi upah minimum regional pada sektor perdagangan di Purwokerto Kabupaten Banyumas termasuk dalam kategori jelas. Hal ini dapat dilihat dari *Standard Operating procedure (SOP)* sudah cukup jelas untuk pelaksanaan upah minimum regional. Meskipun masih mendapati perusahaan yang belum mematuhi ketentuan tersebut. Berdasarkan analisis besarnya pengaruh antara struktur birokrasi terhadap keberhasilan implementasi sebesar 92,3% persen, dengan nilai signifikansi 0,000. Dengan demikian terbukti kebenarannya bahwa struktur birokrasi berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi.

## B. Implikasi

Dari hasil penelitian tersebut peneliti akan mengajukan beberapa implikasi kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas sebagai pelaksana kebijakan upah minimum regional pada sektor perdagangan di Purwokerto Kabupaten Banyumas, antara lain:

1. Meskipun faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan upah minimum regional pada sektor perdagangan di Purwokerto Kabupaten Banyumas berada di kategori jelas, baik dalam hal penyampaian informasi kebijakan dan kejelasan informasi kebijakan, namun aparat pelaksana harus mencoba mekanisme baru dalam hal komunikasi kepada para pengusaha perdagangan khususnya bagi pengusaha yang belum menerapkan kebijakan upah minimum regional untuk segera menerapkan kebijakan upah minimum regional hal ini agar dapat meningkatkan penghasilan pekerja pada tingkat paling bawah dan menghindari adanya kesenjangan upah terendah dengan tertinggi.
2. Meningkatkan ketegasan pegawai Dinsosnakertrans Kabupaten Banyumas meskipun untuk faktor disposisi dalam implementasi kebijakan upah minimum regional pada sektor perdagangan di Purwokerto Kabupaten Banyumas dalam kategori baik dalam hal sikap, komitmen maupun konsistensi aparat pelaksana dalam kebijakan, khususnya para petugas lapangan terutama yang melakukan monitoring pelaksanaan upah minimum regional kepada perusahaan perdagangan dalam rangka pemantauan pelaksanaan, hal ini bertujuan agar tidak terjadinya kegagalan

kebijakan maupun pelanggaran pengusaha perdagangan terhadap kebijakan upah minimum regional yang telah ditetapkan.

3. Para aparat pelaksana yaitu Dinsosnakertrans Kabupaten Banyumas yang terlibat dalam kebijakan harus saling berkoordinasi dengan para pengusaha perdagangan dalam rangka memberikan ketegasan dalam penerapan sanksi kepada pengusaha perdagangan yang hingga saat ini belum menerapkan kebijakan upah minimum regional di Purwokerto Kabupaten Banyumas.
4. Para aparat pelaksana yaitu Dinsosnakertrans Kabupaten Banyumas yang terlibat dalam kebijakan harus sering melakukan evaluasi agar dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam implementasi kebijakan upah minimum regional pada sektor perdagangan di Purwokerto Kabupaten Banyumas.